

SALAH SATUNYA RATU KALINYAMAT

Enam Tokoh Dianugerahi Pahlawan Nasional

JAKARTA (KR) - Presiden Jokowi memberi anugerah Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2023 di Istana Negara Jakarta, Jumat (10/11). Penganugerahan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 115/TK/Tahun 2023 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 6 November 2023.

"Sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas jasa-jasanya yang luar biasa, yang semasa hidupnya pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa," bunyi kutipan Keppres.

Keenam tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional dalam rangka Hari Pahlawan Tahun 2023 tersebut adalah Almarhum Ida Dewa Agung Jambe (tokoh dari Provinsi Bali), Almarhum

Bataha Santiago (tokoh dari Provinsi Sulawesi Utara), Almarhum Mohammad Tabrani (tokoh dari Provinsi Jawa Timur), Almarhumah Ratu Kalinyamat (tokoh dari Provinsi Jawa Tengah), Almarhum K.H. Abdul Chalim (tokoh Provinsi dari Jawa Barat) dan Almarhum K.H. Ahmad Hanafiah (tokoh dari Provinsi Lampung).

Selain itu, Presiden Jokowi juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Pratama kepada Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Giovanni Vincenzo Infantino. Penganugerahan ini berdasarkan Keppres Nomor 70/TK/Tahun 2023 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Pratama yang ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 7 Agustus 2023.

Upacara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo diikuti tamu undangan lainnya kepada para ahli waris penerima gelar Pahlawan Nasional Tahun 2023 dan penerima gelar Tanda Kehormatan Republik Indonesia. **(Ati)-f**



KR-Antara/Hafidz Mubarak A

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono (kiri) bersama Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai melihat foto-foto tokoh yang diberi gelar Pahlawan Nasional yang dipajang saat pemberian gelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/11/2023).

DLAWALI RAPAT PLENO KPU RI

Senin, Penetapan Pasangan Capres Cawapres

JAKARTA (KR) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menegaskan, penetapan daftar calon tetap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres cawapres) untuk Pemilu 2024 dilakukan Senin (13/11). KPU akan melakukan rapat pleno tertutup sebelum mengumumkan penetapan pasangan capres cawapres.

"*Inshaallah* Senin (13/11), setelah KPU mengambil keputusan tentang pasangan capres cawapres peserta Pemilu 2023," ujar Hasyim di Kantor Bawaslu RI Jakarta, Jumat (10/11).

KPU RI telah menerima pendaftaran tiga pasangan bakal capres cawapres untuk Pemilu 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD serta Prabowo Subianto-Gibran Ra-

kabuming Raka. Pasangan Anies-Muhaimin diusung Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Ummat dan Masyumi.

Pasangan Ganjar-Mahfud didukung PDI Perjuangan, PPP, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Sedangkan pasangan Prabowo-Gibran gabungan koalisi Partai Gerindra, Golkar, PAN, Partai

Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) serta Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

KPU RI telah menetapkan masa kampanye pemilu mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

Pada bagian lain Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, pemasangan dan akses kamera pengawas atau CCTV yang terkoneksi dengan sejumlah markas kepolisian resor di Jatim sesuai nota kesepahaman antara KPU dan Polri.

Hal ini juga dilakukan atas sepengetahuan Ketua KPU dengan Kapolri Jenderal Polisi

Listyo Sigit Prabowo. "Hal tersebut merupakan perwujudan dan pelaksanaan kerja sama antara KPU dan Polri sebagaimana MoU yang telah ditandatangani Ketua KPU dengan Kapolri 29 Desember 2022 lalu," kata Hasyim, kemarin.

Ia menjelaskan pemasangan CCTV itu sebagai bentuk pengamanan dari kepolisian. Pengamanan aparat kepolisian terhadap KPU meliputi personel, aset dan logistik (produksi, distribusi dan penyimpanan di gudang). Hasyim menegaskan, pengamanan tersebut merupakan wewenang kepolisian yang telah diatur dalam UU Pemilu. Untuk itu, ia menilai wajar apabila CCTV dipasang di lingkungan Kantor KPU. **(Ant/Obi)-d**

PANJI GUMILANG DIPERIKSA SOAL TPPU

Penyidik Dalam Aliran Dana

JAKARTA (KR) - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah memeriksa Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pidana yayasan dan penggelapan. Dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami terkait aliran dana yang diduga mengalir ke rekening pribadi tersangka.

Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol Robertus Yohanes Dedeo di konfirmasi di Jakarta, Jumat (10/11) mengatakan, pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan awal di mana penyidik berfokus pada pokok perkara yang ditangani yakni terkait aliran dana yayasan, yang diduga dengan sengaja dialirkan ke rekening tersangka, dan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi atau pembelian aset. "Sementara masih pemeriksaan awal yang bersangkutan sebagai tersangka, masih seputar peran yang bersangkutan terkait penyimpangan dalam pengelolaan aset yayasan," ungkapnya.

Pemeriksaan terhadap Panji Gumilang dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Indramayu, Jawa Barat. Melibatkan lima orang penyidik dari Dittipideksus Bareskrim Polri.

Dalam proses pemeriksaan tersebut Panji Gumilang didampingi oleh penasihat hukum dari Kantor LBH HIR berjumlah tiga orang. Penyidik berhati-hati dan rinci selama proses pemeriksaan, namun tetap memberikan hak-hak tersangka dan mengedepankan rasa kemanusiaan karena mempertimbangkan usianya telah 77 tahun. **(Ant/Has)-f**

DUGAAN PEMERASAN OLEH FIRLI BAHURI

Polda Uji Barang Bukti Elektronik

JAKARTA (KR) - Direktorat Reserse Polda Metro Jaya, Jumat (10/11) menguji barang bukti elektronik yang disita penyidik. Pengujian dilakukan bersama pemeriksaan saksi dan sejumlah ahli terkait kasus pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Beberapa kegiatan penyidikan, di antaranya pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli uji laboratoris barang bukti elektronik yang disita penyidik," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Si-manjuntak saat dikonfirmasi di Jakarta.

Namun, Ade Safri tidak menyebutkan jumlah saksi yang hari ini akan diperiksa, termasuk identitas atau latar belakangnya. Hanya disampaikan informasi mengenai agenda pemeriksaan terhadap ahli untuk dimintai keterangannya dalam kasus tersebut. "Ahli multimedia, ahli digital forensik dan ahli hukum acara," katanya.

Selain itu, Ade Safri telah menerima undangan rapat koordinasi dan dengar pendapat bersama KPK terkait kasus ini yang

dijadwalkan pada Jumat ini. Namun pihaknya meminta dilakukan jadwal ulang.

"Penyidik menyampaikan untuk undangan rapat koordinasi dan dengar pendapat dimaksud dapatnya dijadwalkan kembali pada minggu ke-3 bulan November dikarenakan pada hari Jumat (10/11) penyidik telah memiliki jadwal kegiatan penyidikan yang sudah terjadwal sebelumnya," katanya.

Sementara itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak penyidik Polda Metro Jaya segera melakukan gelar perkara guna menetapkan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Ketua KPK. MAKI berencana melayangkan gugatan praperadilan apabila penyidik Polda Metro Jaya tidak menetapkan tersangka maksimal minggu depan.

"Senin ini mudah-mudahan, maksimal minggu depan ada upaya lebih lanjut dari kepolisian, minimal ya memanggil ulang, atau lebih tinggi segera menetapkan tersangka," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Jakarta, Jumat (10/11). **(Ant/Has)-f**

SURAT CUTI KAMPANYE PEJABAT

Minimal Diajukan 3 Hari Sebelumnya

JAKARTA (KR) - Pejabat negara yang hendak melakukan kampanye harus mengajukan surat cuti ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai tingkatannya paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan kampanye Pemilu 2024.

Hal itu tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) No 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 62 dan Pasal 63 yang salinannya diterima di Jakarta, Jumat (10/11). Dalam aturan cuti di PKPU ini berlaku setara dengan ketentuan cuti wakil menteri.

"Ketentuan mengenai cuti pejabat negara yang menjadi Pelaksana Kampanye Pemilu atau tim Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berlaku secara *mutatis mutandis* (perubahan yang penting telah dilakukan) terhadap ketentuan mengenai cuti wakil menteri," tulis PKPU Mo 15 Tahun 2023 Pasal 63.

Para pejabat negara yang melaksanakan kampanye, pejabat negara yang berstatus sebagai anggota partai politik juga wajib memperhatikan tugas penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan. Kemudian, dilarang menggunakan fasilitas negara dan fasilitas yang melekat pada jabatan.

Adapun berikut PKPU No 15 Tahun 2023 Pasal 62 dan Pasal 63, (1) Kampanye pemilu oleh pejabat negara dilaksanakan sesuai Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilu. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk ketentuan mengenai hak pejabat negara melaksanakan kampanye pemilu, pejabat negara yang berstatus sebagai anggota partai politik atau bukan anggota partai politik, kewajiban memperhatikan tugas penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan, dan larangan penggunaan fasilitas negara dan fasilitas yang melekat pada jabatan.

Ayat berikutnya (3) Pejabat negara yang diberikan cuti untuk melaksanakan kampanye pemilu harus menaati tata cara pelaksanaan cuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai cuti dalam pelaksanaan kampanye pemilu. (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diproses secara tertulis dan surat cutinya disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan kampanye pemilu. Ayat (5) Surat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Sedangkan Pasal 63, ketentuan mengenai cuti pejabat negara yang menjadi Pelaksana Kampanye Pemilu atau tim Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan mengenai cuti wakil menteri. **(Ant)-f**

Sri Redjeki SSi MKom PhD Rektor UTDI



KR-Surya Adi Lesmana

Pelantikan Rektor UTDI periode 2023-2028.

YOGYA (KR) - Sri Redjeki SSi MKom PhD dilantik sebagai Rektor Universitas Teknologi Digital Indonesia (UTDI) masa jabatan 2023-2028. Pelantikan dilakukan Ketua Yayasan Pendidikan Widya Bakti Yogyakarta Teguh Wijono Budi Prasetyo di kampus UTDI Jalan Raya Janti 143 Yogya, Jumat (10/11). Sri Redjeki menggantikan rektor sebelumnya

Totok Suprawoto. Dalam pidato usai pelantikan, Sri Redjeki mengatakan, sejak mendapat kesempatan berpartisipasi dalam proses pemilihan Rektor UTDI 2023, mendapat kesempatan mendengar keinginan seluruh elemen kampus, para alumni, mitra serta berbagai komponen masyarakat terkait. "Dari kesempatan itu saya menangkap

suatu pesan penting banyak pihak yang mencintai, menaruh harapan tinggi dan senantiasa siap mendukung UTDI," ungkapnya.

Sementara Teguh Wijono menjelaskan, dua tahun lalu tepatnya 10 November 2021, STMik Akakom berubah bentuk menjadi UTDI. Masa transisi dua tahun telah dilalui dengan baik. Atas capaian ini, pihaknya berterima kasih dan penghargaan tinggi kepada Rektor UTDI periode 2021-2023 Totok Suprawoto beserta seluruh jajarannya.

"Kepada seluruh jajaran Senat UTDI saya ucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi telah melakukan seleksi calon rektor UTDI dengan sangat baik, penuh dedikasi dan mampu memilih putri terbaik UTDI," terang Teguh. **(Sal)-f**

UJI KELAYAKAN CALON PANGLIMA TNI Dalam Soal Pemilu Hingga Papua

JAKARTA (KR) - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) terhadap calon tunggal Panglima TNI yakni Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto, Senin (13/11) akan mendalami perihal kesiapan menghadapi Pemilu 2024 hingga persoalan Papua.

"Paling pertama adalah persoalan pemilu hingga masalah keamanan di Papua. Bagaimanapun kesiapan menghadapi pemilu dan tentu prioritas utama penanganan keamanan di Papua," kata Bobby di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (10/11).

Soal isu Papua, Bobby menyebut, pihaknya menekankan perihal pemenuhan formasi keamanan dan pertahanan di Tanah Papua dengan empat Daerah Otonom Baru (DOB) yang baru saja dimekarkan yaitu Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah.

"Kalau dulu kan ada Kodam itu membawahi berapa. Nah, ini kan sekarang apakah Kodam itu akan dibentuk Kodim (Komando Distrik Militer), Kodim baru atau bagaimana formasinya," ujarnya, seraya menyebutkan, wilayah administrasi baru memerlukan organisasi militer yang dapat menaungi kebutuhan di wilayah tersebut.

Mengenai sinyalemen kedekatan Agus Subiyanto dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Bobby menilai, hal tersebut masih dalam batasan-batasan objektif. Seperti diketahui, Agus pernah bertugas sebagai Komandan Kodim (Dandim) 0735/Surakarta. **(Ant)-d**



Koran Merapi

Tuntas Tanpa Tendensi

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat